

**DIKTAT MATA KULIAH  
DASAR – DASAR ILMU POLITIK**



**DISUSUN OLEH :  
AWANG DARUMURTI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

## Halaman

Sampul .....	1
Pengesahan.....	3
Konsep dasar ilmu politik.....	4
Konsep dasar system politik.....	7
Budaya politik, sosialisasi politik, partisipasi politik.....	14
Insfrasturkurpolitik dan suprastruktur politik.....	23
Analisa politik era orde lama.....	28
Analisa politik era orde baru.....	30
Analisa politik era reformasi.....	34
Partai politik dan kelompok kepentingan.....	38
Gerakan mahasiswa.....	46
LSM.....	49

**LEMBAR PENGESAHAN  
BAHAN AJAR NON ISBN**

1	Judul	:	Diktat Dasar – Dasar Ilmu Politik
2	Penyusun	:	Awang Darumurti
3	NIK	:	19811019200810163084
4	Unit Kerja	:	Prodi Ilmu Pemerintahan

Yogyakarta, 31 Mei 2019

Ketua Program Studi



Dr. Muchamad Zaenuri, MSi

NIK : 19660828199403163025

## **KONSEP DASAR ILMU POLITIK**

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang( $\pm$ 350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu. Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahkan pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

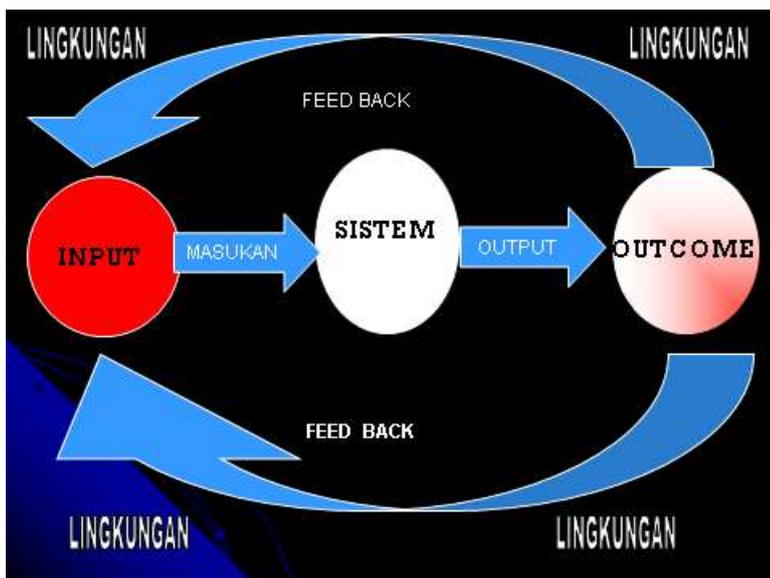
Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun 1948 melakukan

survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama *International Political Science Association (IPSA)* yang mencakup kira-kira sepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari *London School of Economics and Political Science* dalam buku *The University Teaching of Political Science*. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psik

## KONSEP DASAR SISTEM POLITIK

Sistem politik adalah keseluruhan unit-unit politik yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mempengaruhi proses politik. Bagian-bagian atau unit-unit dari sistem politik terdiri dari input, proses, dan output. Berbagai macam input-input ini lalu kemudian diubah oleh proses-proses yang terjadi di dalam sistem tersebut menjadi output, yang selanjutnya output-output tersebut menimbulkan kembali pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana akan tetapi cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal seperti input – proses – output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Diagram di bawah ini merupakan suatu model yang sangat sederhana yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik.



Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendekatan ini, berikut ini adalah ciri-ciri utama dari sistem politik.

### 1. Ciri-ciri Identifikasi.

Untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya, kita harus bisa mengidentifikasikannya dengan menggabarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang

memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada di luar sistem politik itu.

(a) Unit-unit Sistem Politik.

Unit-unit adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini bewujud tindakan-tindakan politik. Perlu sekali memperhatikan tindakan-tindakan ini karena merekalah yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik.

(b) Perbatasan.

Sistem politik selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan berupa sistem-sistem lain. Tidak ada sistem yang hidup dalam lingkungan yang kosong. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya untuk menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan fisiknya.

Suatu sistem politik memiliki perbatasan dalam pengertian yang sama dengan yang dimiliki oleh suatu sistem fisik. Yang termasuk dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk di dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.

## 2. Input dan Output

Input merupakan tuntutan dan dukungan, sedangkan output merupakan keputusan yang otoritatif atau kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem tidak akan dapat berfungsi - begitu pula tanpa adanya output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.

David Easton dalam (Afan Gaffar : 1983 : 11), melakukan telaah tegas atas kehidupan politik dalam kaitannya dengan sistem, dan memperkenalkan dua macam input ke dalam sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Klasifikasi di bawah ini akan memberikan gambaran nyata tentang jarak dan variasi dari input tuntutan, yaitu :

- a. Tuntutan untuk memperoleh barang-barang dan pekerjaan seperti upah, jam kerja, pendidikan, fasilitas rekreasi, dan transportasi.
- b. Tuntutan pengaturan tingkah laku seperti jaminan keselamatan, Kontrol atas harga, dan tuntutan akan adanya suatu peraturan yang menyangkut suatu permasalahan sosial.
- c. Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti, hak pilih, kesempatan untuk menjadi pegawai negeri, dan kesempatan untuk mengorganisir kekuatan politik formal, dan lain-lain.

d. Tuntutan untuk mendapatkan informasi, dan komunikasi seperti, permintaan keterangan dari pemerintah atas suatu kebijakan umum yang sementara dibuat atau dilaksanakan, dan tuntutan untuk menyatakan aspirasi.

Suatu tuntutan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, derajat, serta intensitas yang berbeda-beda. Sedangkan input dukungan dapat diperinci ke dalam empat bagian besar, yaitu :

- a. Dukungan materi, seperti ketaatan membayar pajak, kesediaan bekerja dalam pelayanan umum.
- b. Kepatuhan pada hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang.
- c. Dukungan partisipatif, seperti ikut serta menggunakan hak pilih dalam suatu pemilihan umum, diskusi politik, dan semua kegiatan politik lainnya.
- d. Memperhatikan segala sesuatu yang diumumkan oleh pemerintah, hak pemerintah, simbol-simbol kenegaraan, dan perayaan-perayaan nasional.

Jika suatu sistem politik tanggap atas semua tuntutan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan berupaya untuk memprosesnya secara efektif, maka dukungan dan peran serta dari masyarakat akan diperoleh. Secara umum dapat dikatakan bahwa tuntutan akan menghasilkan keputusan / kebijaksanaan umum, sedangkan dukungan dari masyarakat akan mempermudah suatu sistem politik untuk membuat output atau kebijakan umum.

### 3. Diferensiasi Dalam Suatu Sistem

Input merupakan energi bagi suatu sistem politik dan juga sekaligus merupakan sumber informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan politik. Input-input ini lalu kemudian diproses menghasilkan jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya. Pekerjaan mengubah input menjadi output yang berbeda-beda dalam waktu yang terbatas membuat struktur suatu sistem politik harus mengenal diferensiasi minimal seperti pembagian kerja bagi anggota-anggotanya, dan menyediakan suatu struktur yang bervariasi sehingga dapat menampung pekerjaan yang berbeda-beda dan harus diselesaikan pada saat yang sama.

### 4. Integrasi Dalam Suatu Sistem

Bila suatu sistem ingin mempertahankan dirinya dari kehancuran, sistem tersebut harus memiliki suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan (menyatukan) atau bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif.

#### A. Pengertian : Input tuntutan dan Input Dukungan

## Input : Tuntutan

Input tuntutan ini pada dasarnya merupakan bahan baku, dan sekaligus merupakan informasi yang berharga bagi sebuah sistem politik yang berasal dari masyarakat untuk mengambil suatu keputusan/kebijakan umum. Tuntutan berasal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat yang merasa tidak puas dengan keadaan yang ada. Ketidakpuasan tersebut dapat berupa kelangkaan akan sebagian besar hal-hal atau benda-benda yang bernilai tinggi.

Beberapa dari tuntutan akan nilai-nilai yang relatif langka itu tidak pernah masuk ke dalam sistem politik sebelum dipenuhi melalui perundingan-perundingan pribadi. Input tuntutan itu dapat berupa : pendidikan, lapangan kerja, gaji, fasilitas kerja, harga-harga, suplai kebutuhan pokok, lingkungan hidup, masalah kegamaan, gender, moral, kebudayaan dan lain-lain.

Input tuntutan dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal :

### 1. Tuntutan eksternal.

Tuntutan eksternal adalah tuntutan yang berasal dari luar sebuah sistem politik. Lingkungan sistem politik ini terdiri dari sistem-sistem lain seperti ekonomi, kebudayaan, ekologi, pribadi-pribadi, dan demografi. Masing-masing sistem tersebut merupakan suatu kumpulan besar variabel-variabel yang membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik.

### 2. Tuntutan internal.

Jenis tuntutan ini berbeda dengan pengertian tuntutan eksternal, yaitu sebuah tuntutan yang berasal dari luar sistem politik.. Sangat perlu bagi kita untuk membedakan tuntutan internal dengan tuntutan eksternal oleh karena tuntutan internal bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem politik, akan tetapi merupakan suatu jenis tuntutan yang timbul dari dalam sistem itu sendiri atau disebut juga dengan *withinput*.

Bagaimana agar tuntutan-tuntutan tersebut dapat diubah menjadi isu-isu politik dan faktor apa yang menentukan sehingga suatu tuntutan dapat menjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan diskusi politik yang serius, atau tetap merupakan sesuatu yang harus diselesaikan secara pribadi oleh anggota masyarakat tersebut ?

Timbulnya suatu tuntutan, baik internal maupun eksternal tidak begitu saja akan menjadi sebuah isu politik yang mendapat perhatian para pengambil keputusan. Banyak tuntutan yang hilang begitu saja begitu diajukan kepada pembuat keputusan / pembuat kebijakan umum, ataukah proses pengajuannya seret dan bertele-tele hanya karena didukung oleh anggota masyarakat yang kurang berpengaruh dan tidak pernah bisa masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan, sedangkan yang lain mungkin menjadi isu politik. Isu politik merupakan suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-

saluran yang diakui dalam sistem itu.

Bila kita ingin memahami proses perubahan tuntutan menjadi isu, maka kita harus mendapatkan data yang cukup seperti ; (a) mengetahui hubungan antara suatu tuntutan dengan lokasi dari pencetusnya atau pendukungnya dalam struktur kekuasaan pada masyarakat tersebut, (b) pentingnya kerahasiaan jika dibandingkan dengan publisitas atau keterbukaan dalam mengajukan tuntutan tersebut, (c) masalah waktu diajukannya tuntutan tersebut, (d) kecakapan dan pengetahuan politik, (e) penguasaan saluran komunikasi, (f) sikap dan suasana pemikiran masyarakat, dan (g) gambaran yang dimiliki oleh pencetus tuntutan itu mengenai cara kerja sistem politik tertentu. Jawaban terhadap masalah-masalah ini mungkin akan merupakan suatu indeks perubahan atau konversi yang mencerminkan probabilitas bagi suatu kumpulan tuntutan untuk bisa diubah menjadi sebuah isu politik yang hidup.

#### B. Input : Dukungan

Untuk dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu sistem politik juga memerlukan energi dalam bentuk dukungan. Bentuk-bentuk dukungan itu berupa tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan ataukah merintangi sistem politik. Jadi input dukungan berfungsi untuk merintangi ataukah memajukan suatu pengambilan keputusan atau kebijakan umum. Jenis input ini disebut juga dengan support inputs.

Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa terpenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Jika sebuah tuntutan ingin mendapatkan tanggapan, kelompok kepentingan yang memperjuangkan satu tuntutan menjadi sebuah keputusan/kebijakan umum yang mengikat, maka kelompok kepentingan tersebut harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain yang ada di dalam sistem politik tersebut.

Menurut David Easton dalam (Mas'ood dan MacAndrews : 2000 : 12), tingkah laku mendukung ada dua macam; (a) Tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain yang mungkin berwujud memberikan suara yang mendukung, membela, atau mempertahankan tindakan tersebut. tindakan mendukung dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka ini disebut juga dengan istilah over action.

Sebaliknya, tingkah laku mendukung ini mungkin tidak berwujud tindakan yang nampak nyata dari luar, tetapi merupakan bentuk-bentuk tingkah laku "batiniah" yang kita sebut pandangan atau suasana pemikiran. Suasana pemikiran yang mendukung (supportif) merupakan kumpulan sikap-sikap atau kecendrungan-kecendrungan yang kuat, ataukah suatu kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Dalam tahap ini, memang tidak ada tindakan nyata atau terbuka akan tetapi implikasinya jelas bahwa seseorang mungkin akan melakukan suatu tindakan yang searah dengan sikapnya. Bila seseorang yang kita anggap memiliki suasana pemikiran tertentu ternyata tidak

bertingkah laku atau tidak bertindak sesuai dengan suasana pemikiran tersebut, maka kita berasumsi bahwa kita tidak cukup dalam memahami dan menyelami perasaan yang sebenarnya dari orang tersebut dan hanya memperhatikan sikap yang tampak dari luar saja.

### C. Mekanisme Dukungan

Tidak ada satu sistem politik yang dapat menghasilkan output berupa keputusan-keputusan yang otoritatif jika dukungan, di samping tuntutan tidak memperoleh jalan masuk ke dalam sistem politik. Dukungan merupakan input yang penting bagi suatu sistem politik. Dukungan bagi suatu sistem haruslah dipelihara dan dikelola menjadi suatu arus dukungan yang tetap oleh karena tanpa arus dukungan yang tetap dan ajeg suatu sistem tidak akan bisa menyerap energi yang cukup memadai untuk mengubah tuntutan menjadi keputusan. Terdapat berbagai sarana yang bisa digunakan oleh unit-unit politik untuk dapat menyalurkan dukungan pada suatu sistem politik.

#### 1. Output-output Sebagai Mekanisme Dukungan

Output dari suatu sistem politik dapat berwujud pada suatu keputusan atau kebijakan umum. Salah satu cara untuk memperkuat ikatan antara warga negara dengan sistem politiknya adalah dengan cara menciptakan atau membuat keputusan-keputusan yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan warga dari sebuah sistem politik. Output yang berwujud keputusan atau kebijakan umum merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem politik untuk memberikan dukungannya.

Sifat dukungan ada dua, bisa positif juga sebaliknya bisa negatif. Bila dukungan itu negatif, ada kemungkinan dukungan itu diberikan oleh karena pemberi dukungan takut terhadap hukuman. Sehingga dukungan yang diberikan sebagiannya hanyalah merupakan akibat dari ketakutan akan sanksi-sanksi atau karena paksaan.

#### 2. Politisasi Sebagai Mekanisme Dukungan

Begitu seorang individu lahir dan tumbuh dalam suatu masyarakat, maka pada dasarnya ia hidup dengan anggota masyarakat lainnya dalam suatu jaringan ganjaran dan hukuman (*network of rewards and Punishment*), berkomunikasi dengannya, dan menanamkan berbagai jenis tujuan dan norma yang telah melembaga dalam masyarakat, ilmu sosiologi menamakannya dengan istilah proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini seorang individu belajar untuk memainkan berbagai peranan sosialnya. Sebagian dari tujuan-tujuan dan norma-norma ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik yang dianggap bermanfaat dari masyarakat tersebut. Mengenai cara dan bagaimana anggota masyarakat mempelajari pola-pola politik ini, disebut dengan istilah politisasi politik.

Proses politisasi masyarakat, pada awalnya dimulai ketika seorang anak meningkat dewasa

harus menyerap berbagai orientasi dan sikap terhadap masalah-masalah politik yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat tersebut. Bila harapan-harapan anggota masyarakat mengenai cara bagaimana seharusnya setiap orang bertingkah laku dalam situasi-situasi politik tertentu berbeda jauh, maka tidak mungkin dilakukan tindakan bersama dalam membuat keputusan-keputusan yang mengikat.

Agar suatu sistem politik dapat tetap berfungsi dengan tertib dan tidak hancur, anggota-anggota sistem tersebut harus memiliki harapan dasar yang sama dalam hal patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik, cara seorang berpikir tentang berbagai masalah politik, dan cara anggota-anggota sistem memandang dan menafsirkan gejala politik.

Mekanisme yang dipakai selama proses belajar ini, dan yang sangat relevan dengan proses politisasi adalah yang pertama, proses belajar atau politisasi bagi individu tidak pernah berhenti yang dimulai dari masa kanak-kanak. Kedua, politisasi melibatkan suatu jaringan ganjaran dan hukuman. Dengan menyelaraskan diri dengan masyarakat kita akan mendapatkan keuntungan karena dihormati, kekayaan, kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Akan tetapi kalau kita mengingkari masyarakat di luar batas, kita akan ditolak, tidak dihargai, dan seringkali menderita kerugian material. Ketiga, komunikasi yang berulang-ulang mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada seluruh anggota masyarakat melalui mitos, doktrin, dan filsafat politik dalam rangka menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi. Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai tersebut adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, organisasi dan pemimpin masyarakat, serta lambang-lambang negara seperti bendera, upacara-upacara yang dipenuhi makna politik.

Bila keterikatan (attachment) politik itu menjadi mengakar dan sangat kuat melembaga ditengah masyarakat, sistem politik tersebut telah memiliki legitimasi yang tinggi. Dengan demikian, politisasi secara efektif bisa membentuk jalan dengan mana ukuran-ukuran legitimasi diciptakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam sistem politik tersebut. secara empiris terbukti bahwa suatu sistem politik dapat bertahan hidup lama disebabkan oleh dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam akan legitimasi pemerintahannya. Keyakinan yang mendalam tersebut diperoleh melalui proses politisasi.

## **Budaya Politik, Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik**

Budaya politik merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka *Budaya Politik*, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5000 responden yang tersebar di 5 negara: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak.

Sementara itu, sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik. Melalui serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik, individu dari generasi selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka.

### ***Budaya Politik***

Budaya politik adalah *cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.*

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu :

- Orientasi Kognitif

Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.

- Orientasi Afektif

Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga

politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

- Orientasi Evaluatif

Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu.

Orientasi kognitif adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

Orientasi afektif berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, Pembagian Kompor Gas, dan sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

Orientasi Evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah 'diserang' oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jatidiri si politisi termaksud. Orientasi Evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif.

### ***Tipe-tipe Budaya Politik***

Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di 5 negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat 3 budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan

individu di dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada adalah :

Budaya Politik Parokial

Budaya Politik Subyek

Budaya Politik Partisipan

### ***1. Budaya Politik Parokial***

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Budaya politik parokial kentara misalnya, di dalam budaya masyarakat yang masih nomaden. Misalnya ini terjadi di kafilah-kafilah badui jazirah Arabia, suku-suku pedalaman Indonesia seperti Kubu, Dani, Asmat, Anak Dalam, dan sejenisnya. Contoh tersebut dalam pengertian fisik. Namun, dapat pula kita kembangkan parokialisme dalam pengertian lebih luas. Misalnya, dapat kita sebut bahwa sebagian warga Aceh yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia sebagai menganut budaya politik parokial, oleh sebab mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai warga negara Republik Indonesia.

### ***2. Budaya Politik Subyek***

Budaya politik subyek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial oleh sebab individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (strong government)

tetapi bercorak otoritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini banyak terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Suharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membicarakan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun keluarganya. Gejala seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia, yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi.

### ***3. Budaya Politik Partisipan***

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak.

Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati.

Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara yang masih bercorak otoritarian, totaliter, ataupun terbelakang secara ekonomi. Atau, jika tidak makmur secara ekonomi, maka budaya politik partisipan muncul dalam sistem politik yang terbuka seperti Demokrasi Liberal.

### ***Sosialisasi Politik***

Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka Pengantar Sosiologi Politik. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik.

***Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik.*** Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang

menjalankan pemerintahan. Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah :

Melatih Individu

Memelihara Sistem Politik

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri ? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff menyuratkan terdapat 3 cara, yaitu :

**Imitasi.** Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya. Misalnya, Gus Dur adalah anak dari K.H. Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari. Gus Dur sejak kecil akrab dengan lingkungan pesantren dan budaya politik Nahdlatul Ulama, termasuk dengan kiai-kiainya. Budaya tersebut mempengaruhi tindakan-tindakan politiknya yang cenderung bercorak Islam moderat seperti yang ditampakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama secara umum.

**Instruksi.** Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Cara instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, dalam mana guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara mereka.

**Motivasi.** Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain. Dapat saja seorang individu yang besar dari keluarga yang beragama secara puritan, ketika besar ia bergabung dengan kelompok-kelompok politik yang lebih bercorak sekular.

Misalnya ini terjadi di dalam tokoh Tan Malaka. Tokoh politik Indonesia asal Minangkabau ini ketika kecil dibesarkan di dalam lingkungan Islam pesantren, tetapi ketika besar ia merantau dan menimba aneka ilmu dan akhirnya bergabung dengan komintern. Meskipun menjadi anggota dari organisasi komunis internasional, yang tentu saja bercorak sekular, ia tetap tidak setuju dengan pendapat komintern yang menilai gerak pan islamisme sebagai musuh. Namun, tetap saja tokoh Tan Malaka ini menempuh cara sosialisasi politik yang bercorak motivasi.

### ***Agen Sosialisasi Politik***

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu:

***Keluarga.*** Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh Sukarno misalnya, memperoleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda di saat mereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

***Sekolah.*** Selain keluarga, sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik. Sekolah merupakan secondary group. Kebanyakan dari kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya ini.

***Peer Group.*** Agen sosialisasi politik lainnya adalah peer group. Peer group masuk kategori agen sosialisasi politik Primary Group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan ? Tokoh semacam Moh. Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialis saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda. Melalui kegiatannya dengan kawan sebaya tersebut, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.

***Media Massa.*** Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam

media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung ‘berlebihan.’

**Pemerintah.** Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

**Partai Politik.** Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

### **Partisipasi politik.**

Dalam komunikasi politik partisipasi yang dilakukan dalam sebuah sistem politik adalah perilaku anggota khalayak yang aktif yang tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tapi juga menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin itu. James Rosenau meminta kita memperhatikan dua perangkat warga negara yang merupakan khalayak dalam komunikasi politik. Pertama, terdiri atas orang-orang yang sangat memperhatikan politik. Kedua, bahwa ada partisipasi dari orang-orang yang tidak hanya memperhatikan dan menilai, namun diharapkan umpan balik yang dihasilkan akan mengakibatkan adanya tindakan pertukaran pesan dengan pemimpin pemerintahan.

Individu mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda dalam tiga hal atau dimensi: gaya umum partisipasi, motif, yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

A. Gaya partisipasi mengacu pada apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya. Dibagi menjadi tujuh gaya berpartisipasi, yaitu:

1. Langsung/wakilan, melibatkan diri sendiri dengan hubungan yang dilakukan terus menerus dengan figur politik misalnya dengan cara menelpon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor

pemerintahan. Ataupun dengan ambil bagian dengan cara turut merasakan dengan hanya mengetahui informasi atau pesan politik (cara wakilan).

2. Kentara/tak kentara, seseorang dengan gaya seperti ini mengutarakan opini publiknya mempunyai tujuan meningkatkan perolehan keuntungan material. Gaya ini melibatkan keuntungan yang kentara dan instrumental. Ada partisipasi yang kurang instrumental dan kurang kentara serta lebih evaluatif.

3. Individual/kolektif, tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak adalah pada gaya individual bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

4. Sistematis/acak, beberapa individu bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan melalui berdasarkan perhitungan; pikiran perasaan dan usul mereka melakukan sesuatu yang konsisten, tidak berkontradiksi, berkesinambungan dan teguh, dan intensitasnya tidak berubah-ubah.

5. Terbuka/Tersembunyi, orang yang mengungkapkan opini secara terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya.

6. Berkomitmen/tak berkomitmen, warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan atau program bertindak dengan bersemangat dan antusias.

7. Derita/kesenangan, seseorang menaruh perhatian kepada politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

B. Motif partisipasi menyangkut faktor yang meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Dibagi menjadi lima motif, yaitu:

1. Sengaja/tak sengaja, beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi berhasrat berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijakan pejabat pemerintahan. Yang menyebabkan mereka berpartisipasi adalah keadaan, bukan dengan sengaja.

2. Rasional/emosional, orang yang mempunyai tujuan tertentu, teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya, disebut bermotivasi rasional. Sementara beberapa orang bertindak tanpa berpikir, semata-mata karena dorongan hati, kecemasan, kekhawatiran, frustrasi, kecenderungan, praduga, harapan, cita-cita, dan perasaan lain yang ditentukan memotivasi

partisipasi emosional.

3. kebutuhan psikologi/sosial, menggunakan politik untuk memproyeksikan kebutuhan psikologis dan meningkatkan persahabatan sosial, mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang statusnya diinginkan, atau meningkatkan posisi kelompok sosialnya dengan kelompok sosial lain.

4. Diarahkan dari dalam/luar, partisipasi politik yang diarahkan dari dalam diri pribadi dan dari luar erat kaitannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk partisipasi politik. Orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri adalah orang yang beraksi sendiri, yaitu orientasi dan kecenderungannya diperoleh dari bimbingan orang tuanya. Sebaliknya, orang yang diarahkan dari luar lebih kosmopolitan, menanggapi berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas ketimbang dari orang tua.

5. Berpikir/tidak berpikir, setiap orang berbeda dalam menyusun tingkat kesadaran ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi itu terhadap dirinya dan orang lain.

C. Konsekuensi Partisipasi menyangkut interpretatif seseorang sehingga menimbulkan konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik. Dibagi kedalam tiga konsekuensi, yaitu:

1. Fungsional/disfungsional, tidak setiap bentuk partisipasi memajukan tujuan seseorang.

2. Sinambung/terputus, partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung dan apabila sebaliknya maka konsekuensinya terputus.

3. Mendukung/menuntut, melalui beberapa tindakan, orang menunjukkan dukungan terhadap rezim politik yang ada. Misalnya dengan memberikan suara pada Pemilu, membayar pajak, mematuhi hukum, dan lain-lain. Namun ada juga yang mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan.

## **SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK**

Dalam sebuah sistem politik, terdapat dua struktur politik yang menjalankan sistem politik di sebuah negara. Dua struktur politik tersebut adalah supra struktur politik dan infra struktur politik. Untuk lebih jelasnya masing masing struktur tersebut akan dibahas berikut ini:

### **a. Infra Struktur Politik**

Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangun bawah politik atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaan lainnya. Pengelompokan infrastruktur politik yang paling nyata dalam kehidupan modern, misalnya :

- Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.
- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
- Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, kelompok ini tidak ikut dalam pemilihan umum.
- Kelompok Penekan( *Pressure Group* ), merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara persuasi, propaganda, atau cara-cara lain yang dipandang lebih efektif. Mereka antara

lain, industriawan, dan asosiasi lainnya.

- Kelompok Tokoh Masyarakat (*Opinion Leaders*), merupakan kelompok dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan budaya.
- Media Massa (Pers), yaitu media massa dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloit, dan buletin-buletin pada kantor, maupun media massa dalam arti luas, yang meliputi media cetak, audio, audio visual, dan media elektronik

Kelompok infrastruktur politik tersebut sangat penting artinya dalam sistem politik karena secara nyata merekalah yang menggerakkan sistem politik, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan politik, melakukan sosialisasi politik, melakukan seleksi kepemimpinan politik, dan menyelesaikan sengketa politik yang terjadi diantara berbagai fihak didalam dan diluar serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun ke luar.

#### b. Supra Struktur Politik

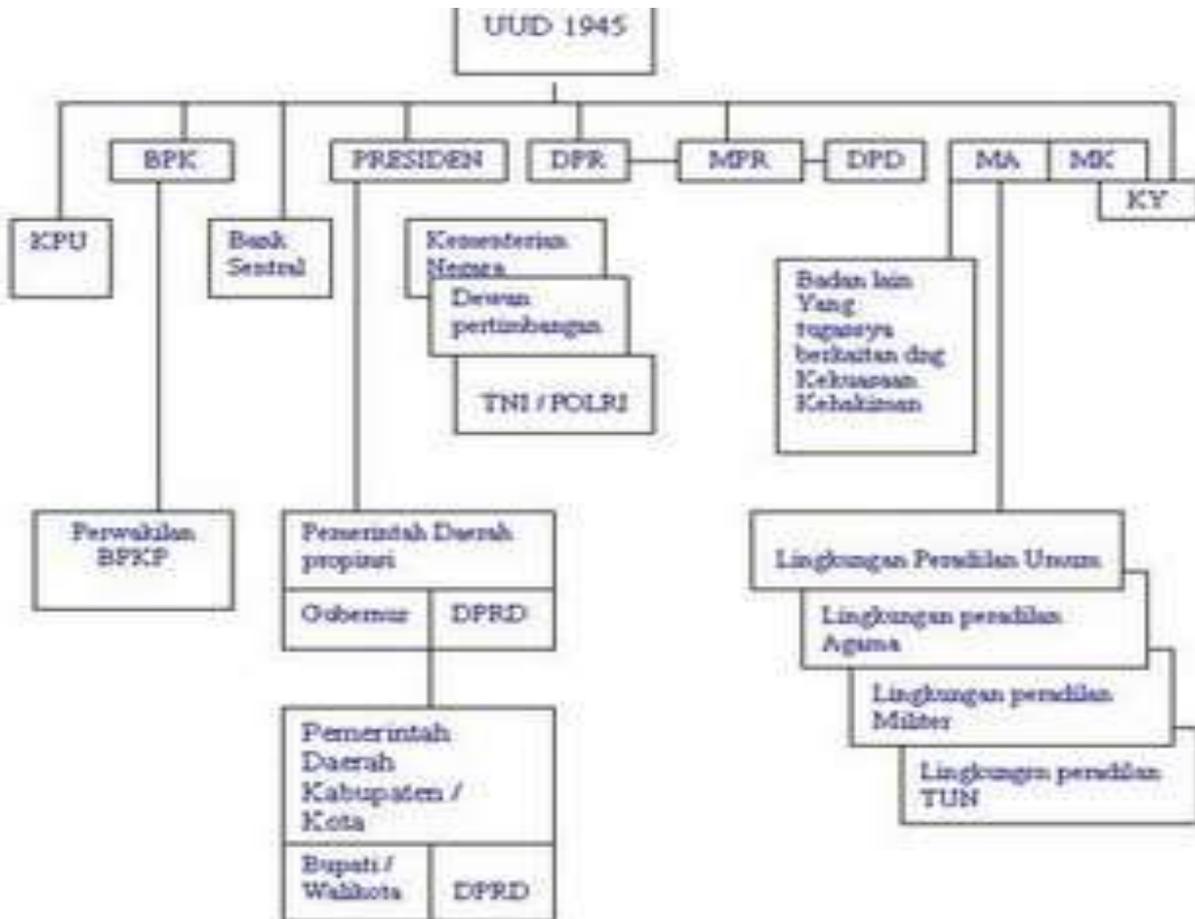
Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga- lembaga pembuat keputusan politik yang sah, lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut teori dikotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan.

Lembaga yang masuk dalam supra struktur politik adalah lembaga – lembaga negara yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan atau peraturan. Pasca amandemen UUD 1945, di Negara Indonesia terdapat beberapa perubahan terkait dengan banyaknya lembaga negara. Ada lembaga yang dihapus, tetapi juga ada lembaga baru yang dimunculkan. Salah satu lembaga yang dibubarkan adalah DPA, sedangkan lembaga baru yang muncul adalah KPK. Berikut adalah lembaga – lembaga negara yang ada di Indonesia.

- *Representation bodies*: Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat
- *Governing Bodies* : Merupakan Lembaga Eksekutif
- *Support Bodies* : Merupakan lembaga pendukung
- *Judiciary Bodies* : Merupakan Lembaga Yudikatif

- *Election Bodies* : Merupakan lembaga Pemilihan umum
- *Monetary Body* : Merupakan lembaga moneter
- *Auditing Body* : Merupakan lembaga Audit
- *Independent Body* : Merupakan lembaga independen

Struktur lembaga negara adalah sebagai berikut :



Masing masing lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi masing masing. Sesuai dengan amandemen UUD 1945, beberapa lembaga juga mengalami perubahan Tupoksi. Salah satu lembaga yang mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi adalah MPR. Bahkan Kedudukan MPR pun mengalami perubahan dari lembaga tertinggi negara, setelah ada amandemen UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara. Berikut tugas pokok fungsi dan kewenangan masing masing lembaga :

1. *Representation Bodies* : Lembaga nya adalah MPR, DPR, DPRD, DPD. Tugas dan kewenangan masing masing lembaga adalah sebagai berikut
  - MPR: Mengubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden dan Wapres

- DPR: Legislasi, Budgeting, Monitoring
  - DPRD: Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain terkait pelaksanaan otonomi daerah
  - DPD: Legislasi ( Mengajukan RUU ), Monitoring Otda
  - Kedudukan DPD merupakan Check and Balance dalam kekuasaan Lembaga legislatif
  - Konstitusi tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai tugas dan kewenangan DPD
2. *Governing Bodies* : Lembaga lembaganya adalah Presiden dan Wapres, Dewan penasehat presiden, Kementerian negara, Pemerintah Daerah
- Presiden dan Wakil presiden, Kewenangannya:
- Eksekutif: Hankam ( Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU, menyatakan keadaan darurat, perang, dll ), Hubungan internasional ( mengangkat duta dan Konsul ), Kebijakan politik ( memberikan amnesti, dll )
- Legislasi: Menetapkan PP, Mengajukan RUU, Menetapkan Perpu
- Yudikasi: Memberikan grasi dan rehabilitasi
- Realisasi dari kewenangan ini terbentuk beberapa lembaga tinggi negara
- Dewan pertimbangan presiden, kewenangannya: Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden
- Kementerian negara: Membidangi urusan tertentu dalam negara
- Pemerintah daerah, provinsi, kota: Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang dijalankan oleh pemerintah pusat
3. *Support Bodies* : Lembaganya adalah TNI dan POLRI
- TNI ( AU, AD, AL ), Kewenangannya: Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangannya: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
4. *Judiciary Bodies* : Lembaganya adalah MA, MK dan Badan lainnya
- MA, Kewenangannya: Mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- MA membawahi 4 lembaga peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer
- MK, Kewenangannya: Menguji UU terhadap UUD, Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus atas perselisihan hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR

tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wapres

Istilah yang diberikan untuk MK adalah Penjaga Konstitusi ( The Guardian of Constitution )

Badan2 lainnya kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari Criminal Justice System. Maka badan yang terkait adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga pemasyarakatan, dan lembaga lain yang terkait dengan hukum semisal KPK

5. *Election Bodies* : Lembaganya adalah Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu  
KPU, kewenangannya menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wapres, Legislatif  
Bawaslu kewenangannya mengawasi jalannya pemilu  
KPU bersifat nasional, mandiri dan tetap  
Di daerah ada KPUD dan Panwaslu
  
6. *Monetary Body* : Lembaganya adalah Bank Sentral ( Bank Indonesia )  
BI punya kewenangan dalam bidang moneter.  
BI punya spesifikasi khusus dalam bidang moneter, untuk itu harus independen dan terpisah dari lembaga tinggi lainnya.  
Namun BI punya kewajiban melakukan laporan terbuka terhadap masyarakat melalui media tentang rencana dan pelaksanaan kebijakan moneter setiap awal tahun. Wajib lapor secara tertulis kepada Presiden dan Wapres tentang pelaksanaan kebijakan moneter.
  
7. *Auditing Body* : Lembaganya adalah Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )  
Kewengannya: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  
BPK mempunyai fungsi audit terhadap pengelolaan keuangan negara  
Kedudukannya yang independen dan diatur dalam konstitusi memberikan kedudukan yang kuat dan harus terpisah dari governing bodies
  
8. *Independent Body* : Lembaganya adalah Komisi Yudisial ( KY )  
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim  
KY berada dalam Bab kekuasaan kehakiman. Namun dari kewenangan yang diberikan, KY tidak termasuk dalam Judiciary Bodies

## **ANALISA POLITIK INDONESIA**

### **ERA ORDE LAMA**

Analisa Sistem Politik Indonesia setiap periode atau rezim yang berkuasa akan menggunakan aspek-aspek: Penyaluran input, Pemeliharaan nilai, Kapabilitas, Integrasi vertikal, Integrasi horisontal, Gaya politik, Kepemimpinan, Partisipasi massa, Keterlibatan militer, Aparat negara, Stabilitas sistem. Dengan demikian analisa sistem politik Indonesia dari Era Orde lama sampai dengan pemerintahan saat ini ( Era kepemimpinan SBY ) menggunakan analisa aspek yang sama. Meskipun memakai aspek analisa yang sama, akan tetapi bisa dipastikan hasil analisa dari setiap aspek akan memperoleh hasil yang berbeda karena setiap rezim mempunyai karakter kepemimpinan yang berbeda pula. Analisa SPI Era Orde Lama di fokuskan mulai dari implementasi demokrasi liberal/Parlementer tahun 1945-1959 dan Demokrasi terpimpin 1960-1965.

#### a. Demokrasi Liberal / Parlementer

- Penyaluran input: Tinggi, tapi sistem belum memadai. Aspirasi rakyat melalui partai politik ( Sistem multi partai ), dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem belum stabil, Sistem Parlementer di Indonesia tidak stabil ( Masa kerja kabinet rata-rata hanya 8 Bulan.

- Pemeliharaan Nilai: Penghargaan HAM Tinggi. Penggunaan UUDS 1950 dianggap sebagai penghormatan atas Hak Asasi Manusia karena UUDS 1950 disusun berdasarkan Universal Declaration of Human Right 1948. The four freedoms versi Franklin D Roosevelt: Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, Kebebasan beragama, Kebebasan dari ketakutan, Kebebasan dari kemlaratan.

- Kapabilitas: Baru sebagian yang digunakan, kebanyakan masih potensial.

Ekstraktif: Penyerapan SDM berjalan bagus melalui partai politik, penyerapan SDA kurang maksimal.

Distributif: Tidak seimbang, Parlemen terlalu kuat dibandingkan Presiden

Regulatif: Pada tataran Undang-Undang Dasar berjalan dengan baik

Simbolik: Diperankan sangat bagus oleh Soekarno

Responsif: Justru cenderung reaktif

- Integrasi Vertikal: Dua arah ( Top Down, Bottom Up ). Ir. Soekarno sebagai “arsitek” integrasi nasional ( Top Down), sementara itu rakyat juga merespon dengan kepercayaan yang baik ( Bottom Up )

- Integrasi Horisontal: Solidarity Maker ( Soekarno ) dan Administrator ( Hatta )
- Gaya Politik: Ideologis. Cerminan Ideologis yang kental dapat dilihat dari variasi ideologi yang ada di parlemen, antar ideologi sangat berjarak
- Kepemimpinan: Angkatan Sumpah Pemuda 1928
- Partisipasi Massa: Sangat Tinggi, bahkan muncul kudeta
- Keterlibatan Militer: Militer dikuasai oleh sipil
- Aparat Negara: Loyal kepada kepentingan kelompok atau partai politik
- Stabilitas: Instabilitas

b. Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1965 )

- Penyaluran input: tinggi, tapi tidak tersalurkan karena ada Front Nasional. Soekarno ( nasionalis ) sebagai pusat kekuatan politik memiliki otoritas yang tinggi untuk menilai input dari rakyat, apakah akan diterima atau tidak
- Pemeliharaan nilai: Penghargaan HAM rendah. Four freedoms tidak berjalan dengan baik
- Kapabilitas: Cenderung Abstrak, Simbolik, ekonomi tidak maju
- Ekstraktif: Penyerapan SDM dan SDA tidak berjalan dengan baik
- Regulatif: Kekuatan Presiden diatas segalanya, bahkan UUD 1945 bisa dilanggar
- Distributif: Trias politika tidak berjalan
- Simbolik: Soekarno masih sangat bagus memainkan aspek ini
- Integrasi Vertikal: Atas bawah ( Top Down ). Hal ini terjadi karena peran partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat “dikebiri”, sehingga kekuatan rakyat dari bawah ( Bottom Up ) tidak punya kekuatan
- Integrasi Horisontal:Solidarity maker yang berperan sangat besar
- Gaya politik: Ideolog, NASAKOM
- Kepemimpinan: Tokoh Kharismatik dan paternalistik
- Partisipasi Massa: dibatasi, konsekuensi logis dari dibatasinya peran Partai Politik dan DPR adalah rendahnya partisipasi massa ( dalam artian substantif)
- Keterlibatan Militer: militer masuk ke pemerintahan
- Aparat negara: Loyal kepada negara
- Stabilitas: stabil

## **ANALISA POLITIK ERA ORDE BARU**

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

- a. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS\$1.000
- b. sukses transmigrasi
- c. sukses KB
- d. sukses memerangi buta huruf

Sedangkan kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

- a. semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- b. pembangunan Indonesia yang tidak merata
- c. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
- d. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- e. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Menurut Liddle dalam artikel "Warisan Buruk Orde Baru" (hal 92), mengatakan bahwa Sistem politik Orde Baru dibangun atas dasar otoriterisme. Lembaga-lembaga legislatif, partai, pemilu, ormas, pers, dan hampir semua organisasi yang berpotensi mengancam kedudukan pemerintah dikuasai dan dikekang oleh Presiden Soeharto dan bawahan-bawahannya.

1. Penyaluran input: Rendah, banyak pembatasan yang dilakukan oleh Rezim Orba
  2. Pemeliharaan nilai: banyak terjadi pelanggaran HAM. Beberapa yang terpublikasi: Peristiwa Malari, DOM Aceh, Kasus di Timor timur, 27 Juli, dll
  3. Kapabilitas sistem: Yang paling menonjol adalah kapabilitas simbolik dan regulatif
- Ekstraktif: Penyerapan SDM tidak berjalan dengan baik, mengingat hanya orang-orang di sekitar Soeharto yang bisa masuk ke lingkaran kekuasaan negara. SDA dieksploitasi secara masif atas nama pembangunan

Distributif: Trias politika tidak berjalan, Eksekutif ( Soeharto) terlalu dominan, lembaga Legislatif

dan Yudikatif merupakan kepanjangan tangan Soeharto

Regulatif: Regulasi dibuat hanya untuk membatasi potensi ancaman yang akan menggoyang sistem politik yang dibangun oleh Rezim Orde Baru

Sistem Politik Orde Baru di sokong oleh 5 UU Politik : UU Pemilu (UU NO 1/1975), UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU NO 2/1975), UU tentang partai politik dan Golkar (UU NO 3/1975), UU tentang referendum (UU NO 5/1985), dan UU tentang ormas (UU NO 8/1985).

Konsep Dwifungsi ABRI oleh Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto.

Birokrasi/PNS Berpolitik

Simbolik: The smiling general, Bapak pembangunan

Responsif: Responsif "by design"

Kelima paket undang-undang ini sebenarnya tidak dibuat dalam waktu bersamaan. Tiga yang pertama—UU Pemilu, UU Kedudukan DPR/MPR, dan UU Parpol Golkar—dibuat di awal Orde Baru; dan dua yang terakhir—UU Referendum dan UU Keormasan di tahun 1985. Menurut Buyung dan Machfud, di awal Orde Baru memang dibutuhkan satu pemerintahan yang kuat. Karena itu, undang-undangnya sengaja dibuat selltralistis kendati disadari juga bahwa itu bakal kontroversial. Selama masa darurat, hukum besi ini memang menjadi alternatif yang baik. Tapi, tidak lagi setelah keadaan beranjak

Pada tahun 1971 atau enam belas tahun setelah Pemilu pertama.. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Golkar yang menjadi alat kekuasaan pemerintah pada waktu itu menjadi pemenang pemilu. Untuk memenangkan Golkar, seluruh pegawai negeri sipil diharuskan menyalurkan aspirasinya melalui partai ini. Soal sistem pemungutan suara (distrik atau proporsional) dan perihal jumlah anggota yang akan diangkat. Yang terakhir ini, presiden ingin anggota legislatif yang diangkat sampai 50 persen. Sementara itu, partai politik mengatakan cukup lima persen. Akhirnya, pembahasan deadlock, yang membuat pemilihan umum diundur. Kemudian terjadi kompromi: yang diangkat 22 persen saja dan konsesi bagi partai politik adalah sistem distrik ditiadakan.

Pada tahun 1975 melalui UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. UU Pemilu pada masa Orde Baru mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia dimana Presiden sekaligus sebagai lembaga pembina politik.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini

ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Keberadaan pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Keberadaan Ormas ( Organisasi massa ) yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri.

4. Integrasi vertikal: Atas bawah

Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu mematikan aspirasi dari bawah yang bersifat kritis.

5. Integrasi horisontal: Dikendalikan oleh Eksekutif, dengan demikian terjadi integrasi yang semu

6. Gaya politik: intelek, pragmatik, pembangunanisme

7. Kepemimpinan: Teknokrat dan ABRI

8. Partisipasi massa: Awalnya bebas terbatas, namun kemudian sangat dibatasi

9. Keterlibatan militer: Merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

Mengenai susunan keanggotaan DPR dan MPR. Menurut Machfud ada dua hal yang perlu dipersoalkan pada masa ORBA :

Pertama: porsi anggota yang diangkat terlalu besar untuk ukuran sebuah negara demokrasi. Kedua: kerancuan anggota kedua lembaga itu. Terkadang tak ada kriteria, tergantung presiden saja. "Terserah presiden saja. Kalau presiden menghendaki, dari golongan tukang becak pun bisa," ujarnya.

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Presiden sebagai pengendali utama peran militer sehingga kelompok militer diupayakan sebagai kelompok pendukung suharto

Hal ini tampak pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam

anaknyanya.

Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok Nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. Contohnya adalah Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

8. Aparat negara: Loyal kepada negara

Birokrasi yang terstruktur secara sistematis dengan dikendalikan secara penuh oleh pemerintah pusat membuat aparat negara mau tidak mau harus taat pada negara

9. Stabilitas sistem: Stabil

## **ANALISA POLITIK ERA REFORMASI**

Semenjak Soeharto lengser dari kekuasaannya, lebih dari 13 tahun yang lalu, Indonesia telah memasuki apa yang dikenal dengan sebutan “Masa Reformasi”. Dalam khasanah ilmu politik sendiri, masa ini disebut sebagai masa transisi dari rejim otoritarianisme ke sebuah pembentukan rejim yang lebih demokratis. Untuk membangun momentum demokratik yang dimaksud, diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pada sistem politik, yang hanya dapat terwujud melalui serangkaian tindakan. Termasuk diantaranya adalah amandemen konstitusional.

Isu-isu pokok yang diangkat untuk dikaji dan direformasi adalah:

- Reformasi konstitusional dan perundang-undangan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendukung transisi demokrasi
  - Otonomi daerah untuk menjamin partisipasi politik yang inklusif dan administrasi publik yang efektif serta terselenggaranya pembangunan di seluruh Indonesia
  - Mendefinisikan kembali hubungan sipil-militer untuk menjamin supremasi badan-badan perwakilan yang pilih
  - Memberdayakan peran masyarakat sipil baik sebagai pengawas maupun sebagai penggerak pemerintahan demokratik
  - Meningkatkan partisipasi aktif para perempuan dalam politik dan masyarakat
  - Membicarakan tentang kesenjangan fundamental dan kegelisahan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pergolakan sosio-ekonomi dan kecurigaan antar agama.
  - Menjamin bahwa Konstitusi dan semua hukum yang disusun sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional
  - Indonesia harus meratifikasi semua konvensi internasional tentang hak asasi manusia
  - Menjamin bahwa Prinsip-Prinsip Arah Kebijakan Negara dan Piagam tentang Hak- Hak dan Kewajiban Mendasar Negara dan Warga Negara diikutsertakan dalam Konstitusi
  - Menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dipersingkat kecuali dalam kondisi-kondisi
    1. Penyaluran input: tinggi dan terpenuhi
    2. Pemeliharaan nilai: Penghargaan HAM tinggi
    3. Kapabilitas sistem:
- Ekstraktif: Penyerapan SDA dan SDM mengikuti semangat otonomi daerah  
Distributif: Trias politika berjalan lebih bagus, Legislatif mempunyai kekuatan

Fenomena Sistem politik Indonesia masa orde Baru yaitu memiliki ciri-ciri lembaga eksekutif yang kuat yang didukung oleh lembaga legislatif yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya anggota-anggota yang di angkat dari kalangan militer dan golongan-golongan fungsional yang lebih memperjuangkan kepentingan eksekutif daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol institusional terhadap lembaga eksekutif. Konsep Perubahan adalah dipusatkan di sekitar komposisi lembaga legislatif yang paling cocok bagi Indonesia, dimana legislatif bisa mendapatkan kekuasaan untuk membuat aturan perundang-undangan disamping juga berfungsi sebagai pengawas tindakan lembaga eksekutif serta institusi-institusi pemerintah lainnya. Keseimbangan diantara legislatif yang berdaya dan lembaga eksekutif yang efektif.

Fenomena Sistem Politik Orde Baru : Secara efektif Indonesia memiliki suatu sistem parlemen unikameral. Fungsi legislatifnya dijalankan lebih banyak , tapi tidak seluruhnya oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipilih. Sementara itu majelis penuh yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang terdiri dari anggota yang dipilih di tambah dengan anggota yang diangkat, berperan sebagai suatu institusi pemilihan yang memilih Presiden, membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara dan meratifikasi amandemen. Mengubah parlemen menjadi dua kamar ( Bikameral )

Dasarnya adalah adanya perwakilan daerah yang menjamin tersaluranya kepentingan dan aspirasi daerah-daerah di dalam lembaga legislatif nasional. Dengan kondisi keterwakilan seperti itu, diharapkan akan memperkuat pula integrasi nasional.

Selain itu, kamar yang kedua ( perwakilan daerah ) akan menjadi suatu institusi yang berguna untuk menarik keluar daerah dari hanya sekedar perhatian kewilayahannya, menjadi berpartisipasi dan turut bertanggungjawab dalam mengelola bersama seluruh bangsa ini. Lembaga legislatif harus hanya terdiri dari wakil-wakil yang dipilih. Wakil dari TNI di dalam lembaga legislatif harus dihapuskan. Lembaga legislatif membuat semua perundang-undangan, mengambil inisiatif merancang perundang-undangan kepemimpinan, meratifikasi perjanjian dan mengkaji kontrak internasional

Lembaga legislatif harus melakukan pengawasan terhadap militer menyangkut:

- a) Perencanaan anggaran militer
- b) Pengangkatan perwira senior
- c) mobilisasi militer
- d) fungsi dinas intelijen pada militer

Lembaga legislatif mengawasi akuntabilitas lembaga eksekutif pada hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) pengeluaran anggaran publik
- b) pengangkatan pejabat senior

c) kinerja lembaga eksekutif

Lembaga legislatif diberdayakan agar dapat mengkaji kebijakan publik

Mendefinisikan kekuasaan, tugas dan fungsi Presiden dalam Konstitusi, terdiri dari :

Kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sesuai dengan panduan dan maksud yang tertera dalam statuta tentang kekuasaan. Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan parlemen dan Gubernur Bank Sentral untuk menjamin bahwa kebijakan fiskal dan perencanaan ekonomi dapat sesuai satu dengan lainnya. Berkewajiban untuk memerintah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, menjalankan kekuasaannya dengan transparan dan dibawah aturan hukum.

Hal Ini memerlukan :

i) Pengangkatan pejabat publik, badan badan, komitekomite para-statal harus dilakukan secara terbuka dan dipilih lewat proses pengangkatan yang kompetitif ; ii) tender untuk penyediaan barang-barang dan jasa bagi operasional negara harus transparan

Berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada parlemen dan kepada badan-badan konstitusional lain seperti badan Ombudsman dan badan Pengawasan Umum

Disyaratkan untuk patuh kepada ketentuan bertindak yang ditetapkan oleh parlemen

Menghapus DPA dari konstitusi mendatang

Responsif: Aspirasi masyarakat diapresiasi lewat sistem multi partai

Simbolik: Kekuatan sistem politik sangat dipengaruhi kharisma tokoh ( Mulai dari Era Gusdur, Megawati, SBY )

Regulatif: Amandemen UUD 1945, perubahan sistem pemilihan umum, Reformasi hukum dan badan peradilan

4. Integrasi vertikal: Atas-bawah, bawah-atas, diperkuat dengan pelaksanaan otonomi daerah

5. Integrasi horisontal: Awal reformasi terjadi euforia ( legislatif heavy), selanjutnya bisa sesuai konsep trias politika. Konflik elit politik sering terjadi

6. Partisipasi massa: Tinggi

7. Gaya politik: Pragmatis, koalisi di parlemen sangat cair, mudah terjadi perpecahan, elit "hobby" mendirikan partai politik baru

8. Kepemimpinan: Purnawirawan, politisi, sipil

9. Keterlibatan militer: dibatasi

10. Aparat negara: Loyal kepada negara

11. Stabilitas sistem: Tidak stabil

## **ANALISA POLITIK ERA KEPEMIMPINAN SBY**

- Penyaluran input: Tinggi, tetapi belum banyak yang bisa terakomodasi dengan baik
- Pemeliharaan nilai: Dari sisi demokrasi ( kebebasan berbicara dan berpendapat ) masih terpelihara, namun dari sisi keamanan dan ekonomi masih kurang maksimal
- Kapabilitas sistem
- Ekstraktif: SDA dan SDM masih mengikuti semangat otonomi daerah
- Distributif: Kekuasaan dibangun dengan melakukan koalisi besar dengan parlemen ( trias Politika menjadi kurang bermakna )
- Regulatif : Sisi kelemahannya terletak pada politik transaksional dalam pembuatan kebijakan di DPR
- Responsif: Negara kadang kurang cepat dalam merespons tuntutan masyarakat
- Simbolik : Menjadi kekuatan utama untuk stabilitas sistem politik
- Integrasi vertikal : atas bawah, bawah atas ( namun politik pencitraan memegang peranan penting )
- Integrasi horisontal: Dibangun dengan melakukan koalisi besar, dibentuk Setgab.
- Partisipasi massa : Tinggi, dengan cacatan lebih banyak tuntutan daripada dukungan
- Gaya politik : Pragmatis, koalisi dibangun atas dasar kepentingan ( bukan visi misi atau ideologi )
- Kepemimpinan: Pengusaha, politisi
- Keterlibatan militer: dibatasi
- Aparat negara : loyal dengan negara
- Stabilitas sistem: Kurang stabil

## **PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN**

### **I. PARTAI POLITIK**

#### **1. Pengertian Partai Politik**

Carl friedrich dalam (Surbakti : 1999 : 116), memberi batasan mengenai partai politik, yaitu sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Soltau dalam (Surbakti : 1999 : 116), juga memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan , yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Dari uraian tersebut di atas dapat kita rumuskan pengertian partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah

#### **2. Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan / atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak

mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaliter walaupun dilaksanakan maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal. Namun, partai politik baik dalam sistem politik demokrasi maupun dalam sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut.

#### **a. Sosialisasi Politik**

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni : pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

1. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pemahaman nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.
2. Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Indoktrinasi politik ini dilakukan melalui berbagai forum pengarahan yang penuh dengan paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.

#### **b. Rekrutmen Politik.**

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan

pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala suatu partai merupakan mayoritas di dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup suatu sistem politik akan terancam berakhir.

### **c. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga negara.

### **d. Pemadu Kepentingan**

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan kadang kala saling bertentangan seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan tinggi dengan jumlah penerimaan mahasiswa yang lebih sedikit, dan kehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi; antara kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan politik dan kehendak berbagai kelompok seperti mahasiswa, intelektual, pers, dan kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan bahkan sering bertentangan itu maka partai politik dibentuk. Menurut Almond dan Powel dalam (Surbakti :1999 : 119), yang dimaksud dengan fungsi pemadu kepentingan adalah kegiatan menampung , menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi berbagai alternatif

kepentingan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan. Alternatif kebijakan umum yang diperjuangkan oleh partai tunggal dalam sistem politik totaliter lebih banyak merupakan tafsiran atas ideologi doktriner. Dalam sistem politik demokrasi, ideologi digunakan sebagai cara memandang permasalahan dan perumusan penyelesaian permasalahan.

#### **e. Komunikasi Politik**

Pendapat Lucyan W. Pie dalam (Surbakti :1999 : 119), bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Kedua fungsi ini dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskannya sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian segala kebijakan pemerintah yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

#### **f. Pengendalian Konflik**

Konflik yang dimaksud di sini dalam arti yang luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan.

Akan tetapi, tentu suatu sistem politik hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahannya bukan menghilangkan konflik itu, melainkan

mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai-partai politik keberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.

#### **g. Kontrol Politik**

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan juga tolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Dalam sistem kabinet parlementer, kontrol yang dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap kebijakan partai yang memerintah dapat menjatuhkan partai yang berkuasa apabila mosi tidak percaya (karena pemerintah sulit memberi penjelasan yang memuaskan terhadap isi kontrol politik oposisi) mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen.

Menurut Samuel P. Huntington dalam (Surbakti : 1999 : 121), bahwa berdasarkan kenyataan tidak semua fungsi dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politik yang menjadi konteks yang melingkupi partai politik, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain. Di antara faktor lain itu berupa tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik (berakar tidaknya partai dalam masyarakat), dan tingkat kelembagaan partai yang dapat diukur dari segi kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya.

## **II. KELOMPOK KEPENTINGAN**

Kelompok kepentingan ialah sarana yang digunakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan secara bersama-sama menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Kepentingan tersebut dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan-harapan – yang bisa terpenuhi, akan tetapi bisa juga dikecewakan oleh tindakan-tindakan pemerintah. Seseorang ataupun sekelompok orang bisa pula diuntungkan akan tetapi bisa dirugikan oleh tindakan atau keputusan tersebut. Oleh karena itu warga negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Walaupun kelompok kepentingan yang terorganisir tidak mudah dibedakan dengan partai politik, akan tetapi ada satu perbedaan yang nampaknya secara umum diterima. Suatu kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, dan pada waktu yang sama tidak berkeinginan memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik, yaitu jabatan politik, maupun jabatan pemerintahan.

Dalam praktek, perbedaan tersebut tidak setegas itu. Keanggotaan kelompok kepentingan dan keanggotaan partai politik sering tumpang tindih, dan lebih-lebih lagi, kelompok kepentingan sering terlibat dalam penyeleksian calon-calon keanggotaan partai politik dan selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi yang dibentuk oleh pemerintah. Kadang-kadang pula kelompok kepentingan bahkan berkembang menjadi partai politik.

### **A. Jenis-jenis Kelompok Kepentingan**

Sebagaimana dikatakan oleh Gabriel A. Almond dalam (Mas'ood dan MacAndrews : 2000 : 53), bahwa kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Perbedaan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasar keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama, ataupun berdasarkan isu-isu kebijaksanaan – kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi. Berikut ini adalah beberapa jenis kelompok kepentingan yang dikenal, diantaranya adalah :

#### **1. Kelompok Anomik**

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk secara spontan dan seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai, norma-norma yang mengatur serta tidak terorganisir. Jenis kelompok ini terbentuk tanpa ada yang merencanakan sebelumnya, terjadi begitu saja, yang mungkin penyebabnya adalah ketidakpuasan yang lama menumpuk dan dilampiaskan seketika pada saat ada pemicu dan bubar dengan sendirinya. Jenis kelompok ini sering bertumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan-tindakan kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara nonkonvensional seperti kekerasan. Boleh jadi kelompok terorganisir yang oleh karena kepentingannya tidak terwakili secara memadai dalam sistem politik, melakukan suatu insiden yang sepiantas lalu terkesan terjadi secara spontan dan mengarah kepada ledakan yang tidak dapat dikendalikan lagi, bila salah memahami hakikat kejadian tersebut lalu menganggapnya sebagai tindakan kelompok anomik. Kita harus hati-hati menilai, sebab sering kali yang nampak anomik itu kadang kala merupakan tindakan yang direncanakan secara teliti oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

## **2. Kelompok Non-Assosiasional**

Kelompok kepentingan non-assosiasional pada dasarnya sudah terorganisasi, akan tetapi jarang yang terorganisir dengan rapi dan kegiatannya bersifat temporer. Kelompok ini berwujud seperti kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga, atau pemimpin agama.

Secara teoretis, kegiatan kelompok non-assosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga bangsawan mendominasi kehidupan politik. Akan tetapi dalam negara industri majupun, kelompok non-assosiasional seperti keluarga-keluarga yang masih berpengaruh, tokoh-tokoh kedaerahan, serta pemimpin-pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruhnya yang seringkali lebih besar dari pengaruh kelompok profesional. Sarana yang sering digunakan jenis kelompok ini untuk mempengaruhi pemerintah biasanya pertemuan-pertemuan informal yang sering dihadiri oleh pejabat pemerintah maupun pimpinan partai.

## **3. Kelompok Institusional**

Organisasi-organisasi seperti partai politik, perusahaan besar, badan legislatif, militer, birokrasi, dianggap sebagai kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggungjawab melakukan kegiatan lobbying. Kelompok ini bersifat formal dan

memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain selain fungsi artikulasi kepentingan.

Bila kelompok-kelompok kepentingan institusional sangat besar pengaruhnya, hal ini disebabkan oleh basis organisasinya yang kuat. Jenis kelompok kepentingan ini sangat dominan pengaruhnya di negara-negara maju, jika dibandingkan dengan jenis kelompok non-assosiasional.

#### **4. Kelompok Assosiasional**

Kelompok assosiasional seperti serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan pengusaha dan industri (seperti di Indonesia : Kadin, Gapensi, Inkindo, dan lain-lain), paguyuban etnik, persatuan kelompok keagamaan, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dengan cara memakai tenaga staf profesional serta memiliki prosedur standar untuk merumuskan kepentingan.

Kelompok kepentingan ini sangat besar pengaruhnya dalam membela kepentingan mereka. Kegiatan utama mereka adalah melakukan tawar-menawar (*bargaining*) di luar saluran-saluran partai politik dengan pejabat-pejabat pemerintah tentang kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, atau usul suatu rancangan undang-undang di parlemen. Kelompok ini juga berusaha mempengaruhi pendapat umum (*public opinion*) dengan cara kampanye-kampanye lewat iklan.

Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok kepentingan assosiasional – bila diizinkan berkembang cenderung untuk menentukan perkembangan dari jenis-jenis kelompok kepentingan yang lain. Basis organisasi yang menempatkannya berada di atas kelompok kepentingan non-assosiasional, taktik dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat. Dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok assosiasional dengan efektif bisa membatasi pengaruh anomik, non-assosiasional, dan institusional.

## **GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA DALAM MEMPENGARUHI POLITIK**

Mahasiswa dikategorikan masuk sebagai *agent of social change* dan masuk dalam kategori infrastruktur politik serta menjadi mediator bagi masyarakat dan suprastruktur politik. Sebagai kaum intelektual, Mahasiswa mempunyai Lima fungsi yakni mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Selain mempunyai fungsi tersebut, mahasiswa juga berperan dalam kehidupan politik. Faktor faktor yang menjadi pendorong peningkatan peran mahasiswa dalam kehidupan politik adalah :

- **Pertama**, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat.
- **Kedua**, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda.
- **Ketiga**, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari.
- **Keempat**, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Disamping mempunyai peran dalam bidang politik, mahasiswa bisa juga menjalankan peran dalam bidang sosial. Peran sosial mahasiswa diantaranya adalah sebagai Pemikir, Pemimpin atau Pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut.

Secara singkat, pasang surut gerakan mahasiswa dalam mempengaruhi sistem politik di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 1965 – 1970 an

Ujung tombak proses penjatuhan rezim Orde Baru adalah Mahasiswa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah hal tersebut merupakan kemenangan mahasiswa atas tumbangannya Rezim Orde Lama ? Mengapa setelah kelompok yang menang ( Elit Orde Baru ) menguasai pemerintahan, justru mahasiswa disingkirkan dan direduksi kekuatan politiknya ? Ini menjadi indikasi terjebaknya mahasiswa dalam grand design elit politik pada waktu itu. Satu hal yang pasti, mahasiswa pada waktu itu tepat dalam memilih partner perjuangan yang kuat ( Angkatan Darat ).

## 2. 1970 an – 1980 an

Merupakan tahun tahun dimana gerakan mahasiswa mengalami degradasi dengan ditandai oleh banyak peristiwa. Salah satunya adalah kegagalan angkatan 1974 dalam memilih partner yang kuat ( Peristiwa Malari ) dan membuat mahasiswa tidak mempunyai posisi tawar yang kuat dihadapan pemerintah waktu itu. Pada periode tahun 1978-1980 an, Degradasi gerakan mahasiswa akibat upaya sistematis pemerintah ( NKK, Rektor penguasa tunggal di kampus, Campur tangan korporatis untuk menjadikan kampus hanya sebagai tempat belajar ). Sendi-sendi politik mahasiswa dipatahkan dengan tesis pendidikan sebagai pemenuhan tekno struktur pembangunan. Pada akhirnya Organisasi intra kampus ( Dewan Mahasiswa ) dan Organisasi Ekstra Kampus ( HMI, GMNI, PMII, PMKRI, dll ) menjadi mati suri.

Angkatan 1980an hanya menunggu momentum, tidak menciptakan momentum. Dengan menciptakan kelompok studi, tetapi tanpa kaderisasi. Kelemahan angkatan 1980 an : tidak ada kaderisasi, ketiadaan basis massa dan disakumulasi kekuatan mahasiswa. Dengan adanya depolitisasi mahasiswa oleh pemerintah, seharusnya kekuatan sporadis mahasiswa melakukan akumulasi kekuatan secara bersamaan. Yang terjadi justru saling tuduh dan arogansi antar kekuatan mahasiswa, akibatnya terjadi power disaccumulation. Selanjutnya yang terjadi adalah terjadinya kondisi seperti ini: Kelompok marjinal yang semakin termarginalisasi ( Mahasiswa ) yang ingin menggoyang center ( Orde Baru ) yang semakin kuat sama dengan kegagalan.

## 3. 1990an-2000an

Pada periode ini Mahasiswa Mencoba bangkit kembali. Hal ini disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal : Dinamika politik yang semakin terbuka, Perubahan power block / Realian di tingkat elit Orde Baru. Faktor internal : Kesadaran politik mahasiswa mulai muncul, Keberhasilan penghapusan SDSB disebut sebagai legitimasi masih eksisnya gerakan mahasiswa. Pada awal tahun 1992 terjadi fenomena baru gerakan mahasiswa : Fenomena religius, Kesadaran internasional, Konvergensi aksi – refleksi dan puncak keberhasilan di tahun 1998.

Dengan adanya kondisi degradasi gerakan mahasiswa saat ini, maka perlu dilakukan beberapa hal yang bisa menjadi katalisator kebangkitan gerakan mahasiswa di Indonesia agar bisa mempengaruhi sistem politik, bukan malah dipengaruhi oleh sistem politik. Beberapa langkah yang

bisa dilakukan diantaranya adalah :

- Jika posisi tawar belum kuat, belum saatnya memilih partner yang kuat atau memutuskan *grand design* politik tertentu
- Konsolidasi nasional, isu lokal diangkat menjadi isu nasional ( Mengangkat isu dari bawah )
- Semangat dialogis antar kekuatan mahasiswa. Homogenitas visi dan misi menjadi sangat penting.
- Kedewasaan berpolitik antar aktivis yang berbeda ideologi. Faksionalisasi gerakan dan kepentingan justru melemahkan kekuatan. Kolektivitas terbukti lebih ampuh.
- Konsolidasi bertahap dan berkesinambungan dengan target jangka panjang, sehingga terhindar dari gerakan yang prematur, sporadis dan temporer
- Aksi romantisme sejarah keberhasilan angkatan 1966 dan 1998 tidak boleh menjadi euforia berlebihan
- Landasan konseptual yang matang serta peta politik, ekonomi, yang akurat
- Berdiri Otonom, tidak hanya mengandalkan liputan media saja. Liputan media tetap penting untuk menarik perhatian suprastruktur politik, akan tetapi jangan sampai terjebak dalam aksi anarki terus menerus untuk menarik perhatian media dan suprastruktur politik.
- Independensi gerakan mahasiswa, tidak menjadi *underbow* partai politik tertentu. Untuk menjaga netralitas proses artikulasi dan agregasi kepentingan
- Menciptakan momentum, bukan menunggu momentum atas pertikaian elit politik
- Aksi romantisme sejarah keberhasilan angkatan 1966 dan 1998 tidak boleh menjadi euforia berlebihan
- Landasan konseptual yang matang serta peta politik, ekonomi, yang akurat
- Berdiri Otonom, tidak hanya mengandalkan liputan media saja. Liputan media tetap penting untuk menarik perhatian suprastruktur politik, akan tetapi jangan sampai terjebak dalam aksi anarki terus menerus untuk menarik perhatian media dan suprastruktur politik.
- Independensi gerakan mahasiswa, tidak menjadi *underbow* partai politik tertentu. Untuk menjaga netralitas proses artikulasi dan agregasi kepentingan
- Menciptakan momentum, bukan menunggu momentum atas pertikaian elit politik

## LSM DALAM MEMPENGARUHI POLITIK

Menurut Peter Hannan, pakar ilmu sosial dari Australia, LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat Grassroot, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok swadaya lokal. Kelompok ini beranggotakan 20-50 orang. Sasaran LSM adalah untuk menjadikankelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir. Berbicara mengenai Fenomena LSM di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa hal itu diawali Sejak awal abad 20, diawali dengan Boedi Oetomo tahun 1908. Ada pula yang mengatakan bahwa LSM pertama itu adalah Persatuan Bangsa Indonesia yg didirikan Dr.Soetomo. Aktivis LSM mengatakan bahwa PKBI ( Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ) adalah LSM pertama, didirikan pada 23 Desember 1957 di Jakarta.

Perkembangan LSM mengalami pergeseran ideologi dan watak perilaku. LSM Generasi pertama, tahun 1950an-1970an: Pemberdayaan Masyarakat. LSM generasi kedua, tahun 1980an-1990an: Pengembangan dari LSM generasi pertama, muncul tipe LSM yang mengarah pada bidang Advokasi ( Pemberdayaan dan pembelaan atas hak-hak masyarakat ). Namun Efektifkah di Era Orba?. LSM generasi ketiga, tahun 1990an: “Turunan” dari generasi selanjutnya, menjadi lebih kuat, tetapi juga ada yang sangat pragmatis.

LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya, diantaranya adalah: Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik2 untuk memenuhi kebutuhan ini, melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut, merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran2 pembangunan, menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan, pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Teknis operasional LSM: independen, Pemikiran alternatif pembangunan di luar pemerintah, wakil rakyat vis a vis pemerintah, mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Ciri-ciri LSM di Indonesia ( MM Billah): orientasi pada penguatan kelompok komunitas, komitmen kuat terhadap partisipasi rakyat, komunitas LSM yang saling berhubungan. Tipe-tipe LSM: Bagian integral pemerintah, mediator antara pemerintah dan rakyat, pembela rakyat, melebur dengan rakyat

Selain hal-hal tersebut ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan LSM yakni mengenai hubungan antara negara dan LSM. Beberapa pola hubungan antara LSM dan Negara

adalah sebagai berikut:

1. *Autonomus/benign neglect*: Pemerintah tidak menganggap Lsm sebagai ancaman
2. *Facilitation/promotion*: Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai suatu yang bersifat komplementer
3. *Collaboration/cooperation*: Pemerintah menganggap bahwa kerjasama dengan kalangan LSM merupakan suatu yang menguntungkan.
4. *Cooptation/Absorption*: Pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan LSM dengan mengatur segala aktivitas mereka.
5. *Containment/sabotage/dissolution*: Pemerintah melihat LSM sebagai tantangan, bahkan ancaman.

Selain pola hubungan diatas, terdapat model hubungan antara LSM dan Negara yang lainnya. Tiga model hubungan antara LSM dan Negara ( Philip Eldridge ):

1. *High level partnership*: Grassroot development. LSM yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatan lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang advokasi. Kurang memiliki minat pada hal yang bersifat politis. Namun mempunyai perhatian yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2. *High level politics*: Grassroot mobilization. LSM yang aktif dalam kegiatan politik dan bersifat advokasi, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik.
3. *Empowerment at grassroot*. LSM yang cenderung memusatkan perhatian pada usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat grassroot. Tidak begitu berminat mengadakan kontak dengan pemerintah. LSM yang percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat.

**Pola hubungan LSM dan Negara ( Philip Eldridge ):**

<b>ORIENTASI</b>	<b>High level partnership</b>	<b>High level politics</b>	<b>Empowerment at grassroots</b>
Kerjasama dengan program pemerintah	Ya	Terbatas	Tidak
Pembangunan atau mobilisasi?	Pembangunan	Mobilisasi	-
Penetrasi negara	Medium	Tinggi	Rendah
Hubungan antara kelompok kecil dan LSM	Semi independen	Saling mendukung	Otonom
Orientasi dengan bergantung pada negara	Akomodatif	Untuk perubahan	Keadaan

Empat dimensi orientasi yang menentukan pola hubungan politik antara LSM dan Negara:

<b>Dimensi ruang politik</b>	<b>Strategi LSM vis a vis pemerintahan/negara</b>	<b>Strategi pemerintahan/negara vis a vis LSM</b>
Orientasi Isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengkritik dan mengajukan alternatif kebijaksanaan	menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan LSM, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi LSM, mengatur kegiatan mereka dan pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kebijaksanaan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijaksanaan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijaksanaan	Membantu kebijaksanaan. dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijaksanaan

